



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUNG PRABOWO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **715964**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	290.000.000
1. MOBIL, SUZUKI AKN415G(4X2) A/T MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	407.175.255
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.097.175.255
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.097.175.255

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPHENDI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 230559

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.093.230.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/21 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 3368 m² di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 117.880.000
3. Tanah Seluas 16950 m² di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 762.750.000
4. Tanah Seluas 7140 m² di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 285.600.000
5. Tanah Seluas 590 m² di KAB / KOTA INDRAMAYU, WARISAN Rp. 177.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.266.000

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, NISSAN NEW GRAND LIVINA 1.5 XV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.266.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.910.000**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 299.656.291**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.710.062.291



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.710.062.291

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANJAR SUPRAPTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 484518

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 445.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 94.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET SPIN MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 65.937.582**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 604.937.582



III. HUTANG

Rp. 147.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 457.937.582

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIYANI
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
3. NHK : 462550

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m ² /100 m ² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	800.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	800.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANYAN ACHMAD HOESEN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
3. NHK : 232235

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m²/80 m² di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 62 m²/47 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 126.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.671.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 95.501.355

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.381.172.355

III. HUTANG Rp. 3.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.378.172.355

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZMY ULYA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 741701

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/27 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 70.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G 1300 M Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 443.818.552

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.263.818.552

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.263.818.552

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WARINI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 237946

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/29 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	800.000
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	697.518
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	301.497.518
III. HUTANG	Rp.	234.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	67.297.518

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Report Penyampaian LHKPN

Penarikan Data per Tanggal : 29/09/2022 00:59:38

Pelaporan LHKPN Tahun 2021

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Jenis Laporan
All

Status UU
Non UU

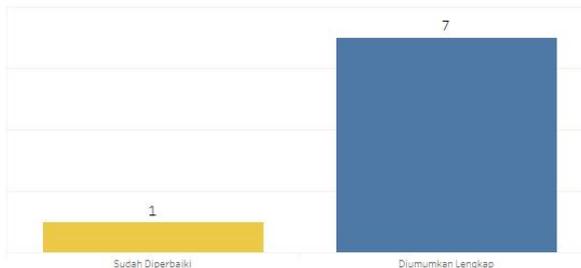
Eselon
All

Sub Unit Kerja
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN

Status Akun WL

Media Pelaporan

Status LHKPN



Online

e-Filing

Online	Total	e-Filing	Total	Sudah Diperbaiki	Diumumkan Lengkap	Total
8	8	8	8	1	7	8
100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	12,50%	87,50%	100,00%

NIK

Nama

Jabatan

NIK	Nama	Jabatan	Sub Unit Kerja	Jumlah Laporan	NHK	Status Akun WL	Tahun WL	Status Pelaporan	Tanggal Lapor	Tanggal Kirim	Status LHKPN	Media Pelaporan
3174051208550002	MELDIANSYAH	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	1	-	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	9/3/2022	Sudah Diperbaiki	e-Filing
3175090905770008	SUPHENDI	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH M..	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	5	230559	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	3/1/2022	Diumumkan Lengkap	e-Filing
3201132010650002	AGUNG PRABOWO	KEPALA BALAI BESAR	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	3	715964	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	8/2/2022	Diumumkan Lengkap	e-Filing
3201134305790010	TRİYANI	BENDAHARA PENERIMAAN	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	5	462550	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	11/1/2022	Diumumkan Lengkap	e-Filing
3211172403860012	YANYAN ACHMAD HOESEN	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	3	232235	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	14/1/2022	Diumumkan Lengkap	e-Filing
3214051209720001	ANJAR SUPRAPTO	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	4	484518	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	17/2/2022	Diumumkan Lengkap	e-Filing
3276010106750033	AZMY ULYA	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	3	741701	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	23/2/2022	Diumumkan Lengkap	e-Filing
3603235611820002	WARINI	BENDAHARA PENGELUARAN	BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEK..	6	237946	Online	2021	Sudah Lapor	31/12/2021	10/3/2022	Diumumkan Lengkap	e-Filing

Penarikan Data per Tanggal : 29/09/2022 00:59:38

**REKAPITULASI LHKASN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN
PELAPORAN TAHUN 2020**

No.	Wajib Lapor LHKASN	Yang Sudah Melaporkan	Yang Belum Melaporkan	Keterangan
1	130	128	2	-

Tangerang, 25 Juni 2021
Subkoordinator Kepegawaian




Kartini, SP
NIP. 197701232005012001